

BAB I

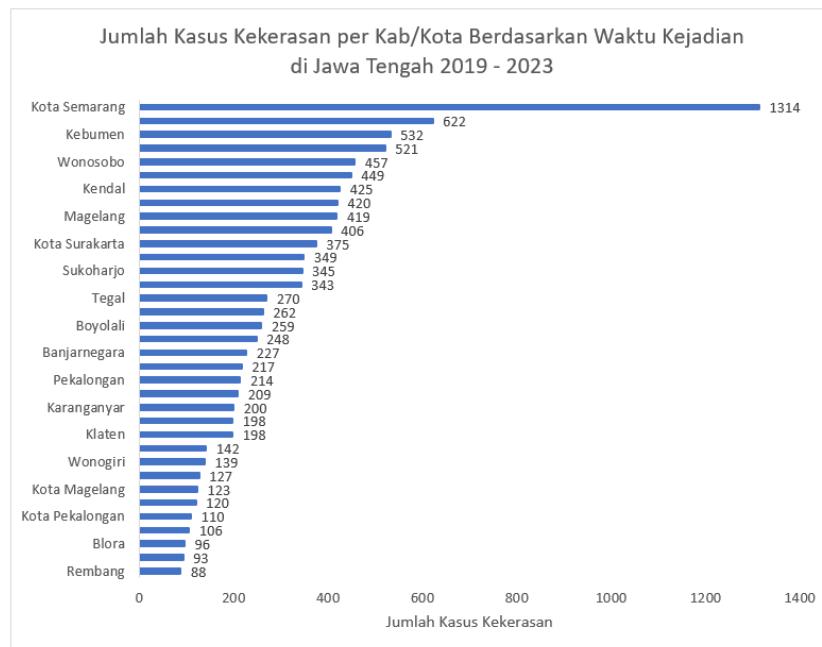
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

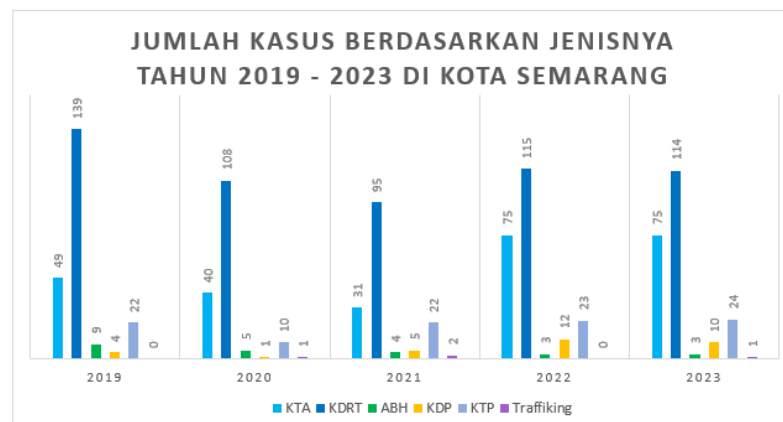
Fenomena kekerasan terhadap perempuan yang semakin mengkhawatirkan menjadi sirine keras yang menuntut perhatian serius (Komnas Perempuan, 2024). Berbagai faktor dapat menjadi pengaruh, salah satu yang utama yaitu budaya patriarki yang menempatkan laki-laki dalam posisi dominan dalam masyarakat Indonesia (Purwanti, 2020). Soeroso (2010) juga menyebutkan faktor lain yang memicu kekerasan terhadap perempuan, seperti ekonomi, kecemburuan, keluarga, dan trauma.

Menurut data resmi yang dipublikasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai KemenPPPA RI, di Kota Semarang, fenomena kekerasan, khususnya terhadap perempuan dan anak, masih marak terjadi, terutama di salah satu wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Semarang Timur. Guna merespons kondisi ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai DP3A Kota Semarang, dibentuk untuk mencegah, menanggulangi, dan menyelesaikan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, yang selanjutnya disebut sebagai KDRT. Di mana, menurut data yang dilansir dari laman resmi DP3A Kota Semarang, KDRT tercatat sebagai kasus kekerasan tertinggi terhadap perempuan dan anak di kota tersebut. Sayangnya, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh Peneliti selama kurang lebih empat bulan, dalam menyusun dan

mengaktualisasikan upaya-upaya pencegahan, DP3A Kota Semarang belum dilandasi dengan adanya pengkajian, penilaian, ataupun metode pengukuran lainnya, sehingga hasil yang dicapai kurang maksimal.



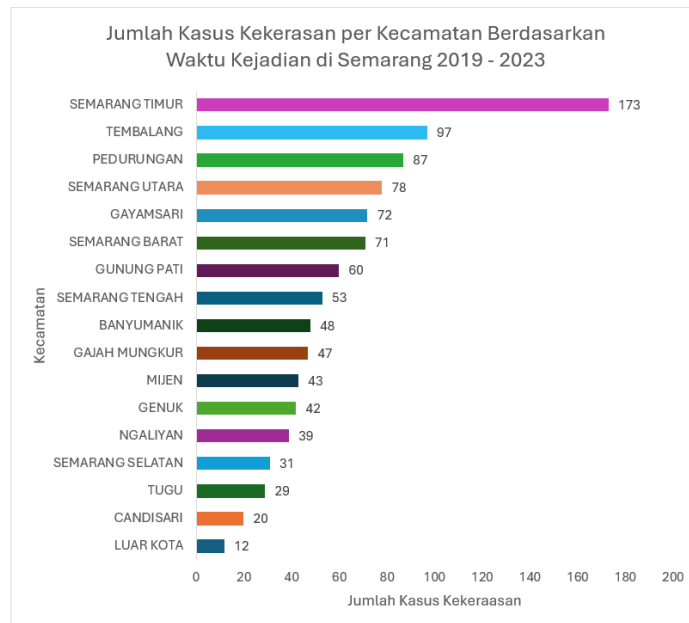
Gambar 1. 1 Jumlah Kasus Kekerasan per Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Waktu Kejadiannya



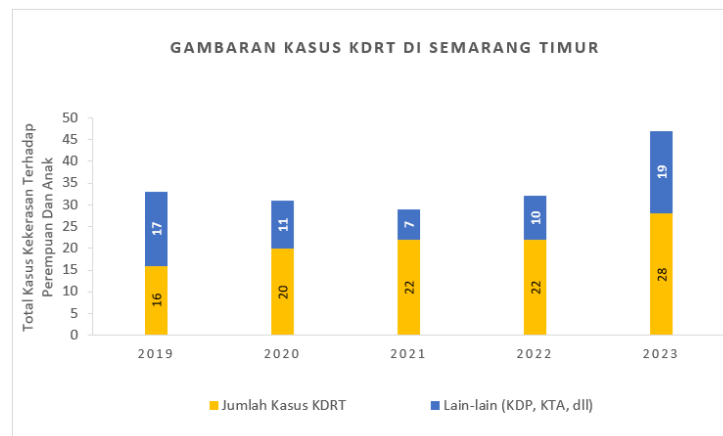
Gambar 1. 2 Jumlah Kasus Kekerasan Berdasarkan Jenisnya di Kota Semarang pada Tahun 2019 - 2023

Saat ini, Kota Semarang tercatat sebagai kota dengan jumlah kasus kekerasan paling tinggi di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2019 – 2023. Dalam lima tahun terakhir, sebanyak 1.314 kasus kekerasan tercatat di kota ini, di mana 571 kasus di antaranya merupakan kasus KDRT. Dari jumlah tersebut, dapat diketahui bahwa wilayah Semarang Timur menjadi area dengan kasus kekerasan, khususnya kasus KDRT, paling banyak selama lima tahun berturut-turut dibandingkan dengan 16 kecamatan lainnya.

Fenomena yang terjadi pada wilayah tersebut umumnya juga didorong oleh beberapa faktor lainnya. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang (2024) menyatakan bahwa Semarang Timur memiliki angka kepadatan penduduk tertinggi di Kota Semarang. Di mana, menurut Christiani et al. (2014), kondisi ini berdampak pada tingginya berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, kurangnya lapangan kerja, dan kriminalitas. Faktor-faktor inilah yang menjadi pemicu tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, di Kecamatan Semarang Timur.



Gambar 1. 3 Jumlah Kasus Kekerasan per Kecamatan Berdasarkan Waktu Kejadian di Kota Semarang pada Tahun 2019 - 2023



Gambar 1. 4 Perbandingan Jumlah Kasus KDRT dengan Jenis Kasus Lainnya di Semarang Timur pada Tahun 2019 - 2023

Seperti yang dapat dilihat pada diagram di atas bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Semarang Timur mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Meskipun terdapat peningkatan dalam kesadaran masyarakat terhadap KDRT, yang ditunjukkan melalui peningkatan jumlah pelaporan kasus,

namun jumlah angka kasus KDRT belum menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pencegahan dan penanganan KDRT di Kecamatan Semarang Timur masih membutuhkan perhatian yang lebih serius.

Melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang mendelegasikan kewajiban pemerintah Kota Semarang dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) kepada DP3A Kota Semarang. Dilansir melalui laman resminya, DP3A Kota Semarang menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak pada dasarnya mencakup beberapa jenis, yaitu kekerasan terhadap anak (KTA), kekerasan terhadap perempuan (KTP), kekerasan dalam pacaran (KDP), anak berhadapan dengan hukum (ABH), *trafficking*, dan KDRT.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut sebagai KDRT, didefinisikan sebagai

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Lebih lanjut, pada Pasal 2 UU PKDRT menyatakan bahwa yang termasuk ke dalam lingkup rumah tangga tersebut yaitu suami, istri, anak (kandung maupun tiri), menantu, ipar, besan, dan pembantu rumah tangga atau orang yang bekerja membantu dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Kemudian, menurut Pasal 5

UU PKDRT, bentuk kekerasan dalam KDRT mencakup empat hal, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan/atau penelantaran rumah tangga.

Dalam hal ini, DP3A Kota Semarang memainkan peran penting dalam menjaga dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak mulai dari pengadaan pelatihan pemberdayaan dan peningkatan kualitas masyarakat, pengembangan organisasi perempuan, menyelenggarakan sosialisasi penanggulangan masalah sosial, melakukan pengelolaan data informasi, hingga membantu dan mengawasi proses keadilan bagi korban kekerasan (Riyanto, 2021). Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang, DP3A Kota Semarang memiliki beberapa program kerja guna menekan lajunya angka KDRT. Program kerja tersebut antara lain 1) Program pencegahan tindak kekerasan termasuk KDRT; 2) Perlindungan hukum; 3) Pemulihan; dan 4) Koordinasi (Elista et al., 2021).

Terlepas dari peranan pemerintah dalam menanggulangi fenomena ini, setiap individu juga harus memahami bahwa sebagai unit sosial terkecil, keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama yang berperan penting dalam proses perkembangan individu, khususnya dalam hal sosialisasi (Wiratri, 2018). Nilai-nilai dan perilaku yang kita pelajari di dalam lingkup keluarga akan menciptakan kepribadian diri kita (Tirtawinata, 2013). Dengan kata lain, keluarga membentuk suatu masyarakat. Oleh sebab itu dibutuhkan keluarga yang sehat dan harmonis dalam melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Ibarat dari akar yang kuat akan tumbuh pohon yang besar dan kuat juga. Begitu pula dengan sebuah

bangsa, jika satuan keluarganya kokoh, maka akan lahir bangsa yang maju dan sejahtera pula.

Namun, pada realitanya, kasus KDRT, khususnya terhadap perempuan dan anak, di Indonesia masih menjadi masalah serius yang harus diselesaikan. Bahkan, sampai detik ini, telinga kita masih tidak pernah luput dari pemberitaan tindak KDRT yang terus terjadi di negara ini. Seolah-olah fenomena ini sudah seperti aksioma yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Bahkan, sejak tiga tahun terakhir, KemenPPPA RI telah mencatat bahwa terdapat 59.487 kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Lebih lanjut, terdapat sebanyak 63.772 orang yang menjadi korban dari total keseluruhan kasus tersebut. Dilansir melalui website resmi KemenPPPA RI, mayoritas pelaku kekerasan dari total kasus tersebut berjenis kelamin laki-laki.

Merujuk pada hasil observasi yang dilakukan oleh Peneliti selama menjalani magang di DP3A Kota Semarang, dapat disimpulkan bahwa DP3A Kota Semarang telah melaksanakan berbagai upaya dalam hal pencegahan dan penanganan, khususnya di wilayah Semarang Timur. DP3A Kota Semarang telah memperkuat berbagai program pencegahan, seperti sosialisasi, baik bagi korban maupun para pihak yang berpotensi menjadi pelaku, serta kampanye dan acara sosial lainnya yang dapat menunjang kesadaran masyarakat. Selain itu, DP3A Kota Semarang juga memiliki program penanganan yang meliputi perlindungan dan pemulihan korban kekerasan. Program penanganan ini sendiri didukung dengan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau penunjang. Adapun

program lainnya yang dilakukan pada beberapa kelurahan di Kecamatan Semarang Timur selama kurun waktu dua tahun terakhir ini untuk menekan angka kekerasan di wilayah tersebut, antara lain:

1. Kegiatan sosialisasi, pembentukan, dan penguatan kapasitas kader Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA)
2. Penyuluhan peran keluarga dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. Penyuluhan dan sosialisasi KDRT
4. Penyuluhan bersama dengan tokoh agama dalam mewujudkan kesetaraan gender di lingkungan keluarga melalui program ‘Masjid Ramah Anak’
5. Pengadaan kegiatan FGD tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak bersama kader dan masyarakat
6. Sosialisasi tentang kenakalan remaja
7. Melakukan musyawarah dengan komunitas di Kota Semarang yaitu SANG PUAN
8. Melakukan sosialisasi tentang *bullying* bersama dengan karang taruna
9. Mewujudkan keluarga berkualitas melalui sosialisasi tentang ketahanan keluarga
10. Edukasi terhadap pencegahan pernikahan usia dini bagi anak

Namun, dalam prosesnya, pelaksanaan program kerja tersebut pada dasarnya belum didukung dengan adanya survei, evaluasi, atau alat ukur lainnya, sehingga pada praktiknya sendiri dapat dikatakan masih belum optimal. Selain itu, target audiens yang disasar cenderung lebih berfokus pada ibu-ibu, sedangkan

bapak-bapak jarang dilibatkan. Di sisi lain, dalam hal pemilihan narasumber, seringkali yang diundang bukan lah praktisi atau yang ahli di bidangnya, melainkan pejabat structural seperti kepala dinas atau kepala bidang dari DP3A Kota Semarang sendiri. Praktisi langsung, baik dari tingkat kelurahan maupun dari dinas tersebut sendiri, jarang dilibatkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai kegiatan telah dilaksanakan namun fokus utama lebih pada pelaksanaan secara umum, tanpa memberikan perhatian yang cukup terhadap aspek-aspek yang lebih mendetail. Tidak hanya itu, sebagian besar materi yang akan disampaikan dalam kegiatan program kerja sering kali disusun oleh pihak yang berbeda dengan pihak yang menyampaikannya, yang mana dapat mengurangi konsistensi dan efektivitas dari program tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa DP3A Kota Semarang telah menerapkan berbagai program kerja yang berfokus untuk menanggulangi dan menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang. Akan tetapi, data resmi yang dilansir melalui website ASIKK PAK milik DP3A Kota Semarang, menunjukkan bahwa terdapat beberapa wilayah di Kota Semarang yang masih berada di ‘zona merah’ atau memiliki tingkat kasus kekerasan yang tinggi, dengan Semarang Timur mencetak angka paling tinggi.

Rothschild menjelaskan dalam Grier dan Bryant (2005) bahwa sosialisasi maupun pemasaran sosial merupakan pendekatan yang efektif dalam menginduksi perubahan perilaku sosial, terutama ketika kepentingan umum berbenturan dengan keinginan individu. Rothschild juga menyatakan bahwa sosialisasi banyak digunakan secara luas untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial, salah satunya

untuk mendorong perilaku individu ke arah yang lebih baik. Dukungan atas pandangan ini datang dari Shera Rindra, seorang penyintas kekerasan terhadap perempuan yang aktif berpartisipasi dalam kampanye anti-kekerasan, yang mengakui bahwa sosialisasi atau kampanye, baik yang dilakukan secara luring maupun daring, efektif memengaruhi sikap dan norma sosial.

Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi, seperti penyuluhan, pelatihan, pemasaran sosial, dan sebagainya pada dasarnya berfungsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membawa perubahan positif pada isu-isu sosial. Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan ini sebenarnya sangat relevan untuk menjadi upaya dalam menangani permasalahan yang terjadi di wilayah Semarang Timur. Di sisi lain, DP3A Kota Semarang pun telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan dan berdasarkan pada penelitian terdahulu. Namun, kenyataannya, jumlah kasus KDRT di Semarang Timur, sampai saat ini, masih belum juga membaik. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas dan mengkaji lebih lanjut tentang Memahami Pengalaman Sosialisasi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Wilayah Semarang Timur yang Dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang.

1.2 Rumusan Masalah

Di Kota Semarang, fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam keluarga paling banyak dapat kita temukan di wilayah Kecamatan Semarang Timur. Berdasarkan data yang dilansir melalui website resmi DP3A Kota Semarang, Kecamatan Semarang Timur merupakan wilayah dengan angka kasus KDRT paling

tinggi selama lima tahun berturut-turut. Dalam hal ini, DP3A Kota Semarang hadir dan berperan dalam melaksanakan berbagai macam jenis program kegiatan yang ditujukan guna menekan angka kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan memperbaiki dari akarnya.

Namun, dalam pelaksanaannya, berdasarkan pengamatan yang dilakukan Peneliti pada 28 Februari – 29 Mei 2023 terhadap kinerja dan program kerja DP3A Kota Semarang, mayoritas bahkan hampir seluruh kegiatan sosialisasi yang sudah disusun oleh DP3A Kota Semarang dilaksanakan tanpa terlebih dahulu melakukan survey atau observasi lapangan. Selain itu, dari hasil observasi yang dilakukan Peneliti juga terlihat bahwa kegiatan sosialisasi ini belum diikuti dengan tindakan lanjutan, seperti evaluasi atau survei pemahaman audiens. Di mana, hal tersebut menjadi penting dalam upaya penanggulangan dan menekan angka kasus KDRT di wilayah Semarang Timur. Tidak hanya itu, keterlibatan praktisi ataupun narasumber yang memang ahli di bidangnya masih minim dalam penyusunan strategi. Oleh karena itu, upaya-upaya tersebut belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap penurunan kasus KDRT di wilayah tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini ingin berfokus untuk mengkaji dan memahami lebih lanjut bagaimana pengalaman sosialisasi KDRT di wilayah Semarang Timur yang dilaksanakan oleh DP3A Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami bagaimana pengalaman sosialisasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah Semarang Timur yang

dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang komunikasi strategis dan studi gender. Dengan memahami pengalaman sosialisasi tentang KDRT yang dilakukan oleh DP3A Kota Semarang, penelitian ini juga ditujukan untuk mendorong lebih banyak kajian terkait penyusunan strategi dan evaluasi terhadap kegiatan sosialisasi, khususnya dalam hal pencegahan KDRT. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para peneliti selanjutnya dalam membuat kajian maupun program serupa yang lebih efektif.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi petunjuk serta acuan dalam membantu DP3A Kota Semarang maupun institusi atau organisasi sejenis dalam menyusun strategi sosialisasi dalam mengkampanyekan kekerasan guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat, khususnya terhadap KDRT.

1.4.3 Kegunaan Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat maupun komunitas perlindungan perempuan dan anak dalam menyusun strategi sosialisasi dalam mengkampanyekan

kekerasan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat, khususnya terhadap KDRT.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Paradigma Penelitian

Guba (1990) dan Patton (1990: 37) dalam Sarantakos (2013: 30) menjelaskan bahwa paradigma merupakan cara berpikir atau sudut pandang yang membantu seorang Peneliti dalam melihat dunia dan memahami realitas. Paradigma sendiri mencakup pandangan hidup dan metode dalam menyederhanakan kompleksitas atas realitas. Selain itu, paradigma juga memberikan pedoman kepada Peneliti tentang apa yang dianggap penting, sah, dan masuk akal. Farber (2001) juga menyatakan bahwa paradigma menjadi dasar filosofi yang memberikan kerangka berpikir untuk memandu kita dalam menelaah realitas yang ada di dalam masyarakat (Sarantakos, 2013: 30).

Penelitian ini menggunakan paradigma kritis yang bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis realitas sosial yang seringkali terjebak dalam hubungan yang tidak seimbang dan terdominasi (Halik, 2018). Paradigma kritis sendiri didasarkan pada teori kritis yang memengaruhi asumsi-asumsi yang digunakan. Paradigma kritis adalah pendekatan ilmiah yang mengintegrasikan epistemologi kritik marxisme dalam keseluruhan metodologi penelitiannya.

Paradigma kritis menganggap bahwa realitas tidak berada dalam kondisi harmonis, melainkan cenderung mengalami konflik dan ketegangan sosial. Hal tersebut ditegaskan kembali oleh Lawrence Neuman (2014: 111) yang menyatakan bahwa penelitian paradigma kritis memiliki asumsi kalau realitas sosial senantiasa

mengalami perubahan yang mana gelombang perubahan tersebut disebabkan oleh berbagai ketegangan, konflik, atau kontradiksi dalam hubungan atau institusi sosial. Pada dasarnya, paradigma ini menekankan pada sebuah perubahan dan konflik dengan memperbaiki ide atau gagasan dalam memandang sebuah realitas guna mencapai solusi dari permasalahan yang ada (Sarantakos, 2013: 63). Paradigma ini menerangkan bahwa apa yang dianggap sebagai realitas di dalam masyarakat saat ini, merupakan konstruksi yang terjadi di masa lalu. Lebih lanjut, paradigma kritis menjelaskan bahwa realisme historis yang berlaku di masa lalu kemudian akan memunculkan sejarah pemenang yang kelak akan melahirkan nilai baru (Neuman, 2014: 112). Tujuan lain dari penelitian kritis ini sendiri adalah untuk mengkritisi, mengevaluasi, serta mengubah relasi sosial.

Oleh sebab itu, keputusan Peneliti dalam memilih paradigma kritis ini tidak lain guna menghasilkan penelitian yang berupaya mengkaji realitas sosial mengenai pemahaman pengalaman sosialisasi tentang KDRT guna menciptakan perubahan yang lebih membangun atau menemukan upaya alternatif yang lebih efektif dalam mengatur kehidupan sosial, khususnya pada masyarakat yang berada di wilayah Semarang Timur. Akan tetapi, berdasarkan penjelasan sebelumnya, terdapat beberapa masalah yang perlu diperhatikan, di mana Peneliti menilai, berdasarkan hasil observasi, bahwa DP3A Kota Semarang belum sepenuhnya optimal dalam menjalankan tugasnya. Masih terdapat kekurangan dalam perhatian terhadap hal-hal yang fundamental, seperti proses observasi, evaluasi, kesesuaian materi yang disampaikan, serta pemilihan narasumber yang kompeten di bidangnya, sebelum melaksanakan kegiatan sosialisasi. Selain itu, dengan paradigma kritis, Peneliti juga

berusaha mengkaji apakah DP3A Kota Semarang telah memenuhi tujuan utamanya sebagai institusi pemerintah yang berguna untuk memberikan pemberdayaan terhadap perempuan dan perlindungan kepada anak di Kota Semarang. Dalam kasus ini, tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat, tetapi juga seharusnya secara efektif mencegah terjadinya KDRT. Dengan demikian, penerapan paradigma kritis ini akan membantu Peneliti dalam mengkaji proses produksi pesan yang mengkonstruksi komunikasi dalam strategi sosialisasi yang dilakukan oleh DP3A Kota Semarang.

1.5.2 State of The Art

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji strategi komunikasi dalam pelaksanaan sosialisasi di masyarakat, baik secara luring maupun daring, yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai maupun ajaran tertentu guna meningkatkan kesadaran masyarakat. Berikut ini adalah ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu yang menjadi dasar acuan bagi penelitian ini.

Penelitian pertama datang dari Ririn Triswanti et al. (2024) yang berjudul “Memahami Sosialisasi Kesenjangan Gender melalui Media Sosial Instagram Girl Up Diponegoro”. Penelitian ini disusun untuk memahami sosialisasi tentang kesetaraan gender melalui akun Instagram Girl Up Diponegoro. Dalam prosesnya, penelitian ini melibatkan dua lapisan dalam mengelaborasi perspektif mengenai kesetaraan gender. Perspektif pertama diambil dari pengurus Girl Up Diponegoro guna mengetahui bagaimana proses sosialisasi, urgensi setiap konten, evaluasi, dan pengalaman mereka selama menjadi bagian dari organisasi tersebut. Perspektif lain juga diambil dari para pengikut akun Instagram Girl Up Diponegoro untuk

mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terkait konten-konten yang dipublikasi oleh Girl Up Diponegoro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi kritis dan didukung dengan *standpoint theory*. Data penelitian ini sendiri diperoleh melalui indepth interview, kajian literatur, serta dokumentasi. Selanjutnya, data-data tersebut akan dianalisis secara fenomenologi dengan melalui tahapan seperti *epoche process*, *transcendental phenomenological reduction*, *imaginative variation*, *synthesis of meanings and essence*. Hasil dari penelitian ini yaitu sosialisasi terkait kesetaraan gender yang dilakukan oleh Girl Up Diponegoro dilakukan dengan mengangkat isu-isu terkini, dengan strategi penyesuaian media dan penyajian yang mudah dipahami. Tolak ukur keberhasilan dalam mendidik dan meningkatkan kesadaran masyarakat, dalam hal ini, diukur melalui interaksi di Instagram dan kemampuan pengurus dalam membuka diskusi. Tidak hanya itu, pengurus, yang terinspirasi oleh pengalaman diskriminasi, merasakan peningkatan pengetahuan dan kepercayaan diri. Secara keseluruhan, semua informan berbagi pengalaman yang menentang dominasi terhadap perempuan.

Selanjutnya, penelitian lain dilakukan oleh Junaidin Rahmi (2024) dengan judul “Strategi Komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bima dalam Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)”. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori POACE dalam menganalisis dan mengkaji lebih lanjut data yang telah terhimpun. Terdapat lima tahapan dalam proses analisis pada penelitian

ini, yaitu tahap perencanaan, tahap persiapan, pelaksanaan kegiatan, tahap pengontrolan, serta tahap evaluasi. Pada tahap perencanaan, DP3A Kabupaten Bima mengadakan pertemuan untuk merancang kegiatan, menyusun target, dan menentukan stakeholder. Selanjutnya, pada tahap persiapan, dilakukan survei lapangan dan melibatkan ibu-ibu PKK. Tahap pelaksanaan mencakup sosialisasi tatap muka dengan media visual, seperti poster dan leaflet. Guna memastikan kegiatan berjalan dengan lancar dilakukan tahap pengontrolan yang dilaksanakan oleh pimpinan DP3A Kabupaten Bima. Terakhir, proses evaluasi dilakukan dengan menghimpun masukan dan memberikan kesempatan kepada anggota untuk memberikan saran perbaikan.

Penelitian ketiga datang dari Subhan AB et al. (2022) dengan judul “Strategi Komunikasi Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga”. Tujuan dari penelitian ini ialah guna mengkaji strategi komunikasi yang digunakan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di SAT Reskrim Polres Aceh Tengah serta mempelajari fakta penyebab meningkatnya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Pada penelitian ini, metode yang digunakan bersifat kualitatif dengan teknik pengumpulan data seperti wawancara, studi pustaka, dan observasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa strategi komunikasi yang efektif dalam mencegah KDRT yaitu melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat dan bekerja sama dengan DP3A Aceh Tengah dalam menentukan target sasaran serta melakukan observasi di masyarakat. Adapun beberapa hambatan yang dihadapi oleh Unit PPA Polres Aceh Tengah, di

antaranya seperti kondisi psikologi, baik komunikator maupun komunikasi, yang harus dipersiapkan dahulu dan kondisi sosial budaya yang multikultural.

Penelitian lain yang membahas mengenai strategi komunikasi dalam pelaksanaan sosialisasi di masyarakat juga diteliti oleh Feby Anggraini dan Sri Dwi Fajarini (2021) dengan judul “Strategi Komunikasi dalam Pencegahan KDRT di Kota Bengkulu (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kota Bengkulu)”. Tujuan penelitian ini yaitu mempelajari pola komunikasi di Kota Bengkulu yang digunakan untuk merancang kegiatan sosial guna mencegah terjadinya KDRT. Metode yang digunakan bersifat kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif menggunakan teori pola komunikasi persuasif yang memiliki tiga unsur, yaitu *persuader*, *persuadee*, dan *persepsi*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan tatap muka dengan melakukan sosialisasi dan konseling Islam dapat membantu korban dalam menemukan solusi dari permasalahan yang tengah dihadapi dengan memberikan pendampingan yang diperlukan.

1.5.3 Teori Kontrol Konservatif (*Theory of Concertive Control*)

Dalam bukunya, Miller (2012: 110) menjelaskan bahwa James Baker, George Cheney, dan Phil Tompkins telah menciptakan sebuah teori yang menjelaskan bagaimana hubungan kekuasaan dapat berubah dalam era organisasi berbasis tim. Adapun tiga konsep utama dalam teori ini, yaitu control (*control*), identifikasi (*identification*), dan disiplin (*discipline*).

Dimulai dengan konsep pertama, yaitu strategi kontrol organisasi yang awalnya dijelaskan oleh Edwards (1981). Di mana, dirinya mengidentifikasi tiga strategi utama untuk menerapkan kontrol, yaitu:

1. Kontrol Sederhana, yaitu penerapan kontrol yang langsung dan otoriter di tempat kerja
2. Kontrol Teknologis, yaitu kontrol yang dilakukan melalui proses kerja yang bersifat teknologis, misalnya seperti jalur perakitan atau program komputer
3. Kontrol Birokratis, yaitu bergantung pada struktur hierarkis dan aturan yang telah ditetapkan

Ketiga bentuk kontrol tersebut telah lama menjadi contoh terhadap bentuk kekuasaan dalam organisasi. Akan tetapi, beberapa teoretikus berpendapat bahwa dalam organisasi berbasis tim telah muncul bentuk kontrol baru yang disebut sebagai kontrol konservatif. Sistem kontrol konservatif menjelaskan bagaimana pusat kontrol dalam organisasi berpindah dari manajemen ke pekerja, yang bekerja sama untuk menetapkan aturan dan norma yang mengatur perilaku mereka. Dalam hal ini, manajemen pusat (*top management*) berperan untuk memberikan visi dan nilai yang akan digunakan oleh anggota tim untuk menjadi acuan dalam melakukan segala kegiatan sehari-hari mereka (Miller, 2012: 112).

Konsep kedua adalah identifikasi, yang berarti bagaimana seseorang merasa terhubung dengan organisasi atau kelompoknya. Ketika seseorang mengidentifikasi diri dengan kelompok atau organisasi, dia menganggap kepentingan kelompok atau organisasi sebagai kepentingan pribadinya. Identifikasi ini menunjukkan bagaimana individu dan kelompok dapat bersatu, sehingga individu bertindak

sesuai dengan nilai-nilai kelompok, meskipun tidak ada kontrol sederhana, teknologis, atau birokratis (Miller, 2012: 112).

Terakhir, konsep ketiga yaitu disiplin, yang dipahami sebagai cara kelompok dalam mengatur dan membuat anggotanya berperilaku sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Kelompok kerja atau organisasi menciptakan metode untuk menghargai atau menghukum (*reward and punishment*) perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai mereka. Meskipun nilai-nilai ini mungkin berasal dari manajemen, disiplin dijalankan oleh anggota tim dari kelompok kerja atau organisasi tersebut sendiri. Dengan demikian, dalam sistem kontrol konservatif, anggota tim mengenali nilai-nilai organisasi dan mendisiplinkan diri mereka sendiri sesuai dengan nilai-nilai tersebut.

Barker dalam Miller (2012: 113) menjelaskan bahwa dirinya pernah melakukan pengamatan terhadap sebuah perusahaan yang sedang merubah sistem kerja mereka dari yang awalnya seperti pada umumnya, di mana seorang atasan memberikan perintah, menjadi sistem kerja tim. Dalam sistem baru tersebut, karyawan diharapkan memiliki nilai-nilai yang sama dengan perusahaan, misalnya mengenai kualitas produk atau ketepatan waktu. Dalam prosesnya, Barker menemukan hal menarik dalam tim yang ia teliti, di mana karyawan lah yang membuat aturan dan hukuman jika terdapat anggota tim yang melanggar aturan. Jadi, bukan atasan yang menghukum, melainkan rekan kerja satu timnya sendiri. Misalnya, ada seorang karyawan yang mengatakan bahwa di tim kerjanya memiliki aturan kalau terlambat tiga kali, maka orang tersebut bisa dikeluarkan dari tim. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada atasan yang selalu mengawasi, namun

karyawan atau anggota tim tetap bisa saling mengontrol satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Bahkan, Barker mencatat bahwa disiplin yang diterapkan oleh tim sering kali lebih kuat, lebih sulit untuk dilawan, dan kurang terlihat dibandingkan dengan disiplin yang diterapkan dalam sistem kontrol birokratis.

Dengan demikian, teori kontrol konservatif (*theory of concertive control*) berargumen bahwa kekuasaan atau kontrol dapat dioperasikan secara terselubung melalui konsep identifikasi dan disiplin. Melalui hal tersebut anggota tim akan cenderung mengadopsi nilai-nilai dan norma-norma organisasi, sehingga secara sukarela akan mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan. Bahkan, mereka akan turut serta dalam menegakkan aturan tersebut. Oleh sebab itu, meskipun terdapat nuansa demokratis dan partisipatif dalam organisasi, ideologi manajemen tetap dapat dipertahankan melalui internalisasi nilai-nilai oleh anggota tim.

Dalam sebuah penelitian, terdapat tiga kemungkinan fokus yang akan diteliti oleh seorang peneliti, yaitu efek pesan, isi pesan, dan produksi pesan (Sobur, 2014: 646). Pada penelitian ini, Peneliti akan berfokus pada proses analisis terhadap produksi pesan yang dilakukan oleh DP3A Kota Semarang dalam menyelenggarakan sosialisasi sebagai langkah preventif maupun solusi dari tingginya kasus KDRT di Semarang Timur. Penerapan teori kontrol konservatif dalam penelitian ini terletak pada penjelasan tentang bagaimana kontrol itu berada di tangan para pekerja, sedangkan '*top management*', seperti kepala dinas, bertanggung jawab untuk menanamkan pandangan dan keyakinan yang menjadi pedoman bagi para pekerja. Berdasarkan pengalaman berbagai pihak di DP3A Kota Semarang, seperti kepala dinas, kepala bidang, pendamping, dan pihak internal

lainnya, Peneliti ingin menggali bagaimana mereka melihat peran mereka, baik selama mereka berada pada posisi yang "dikendalikan" atau harus tunduk pada atasan maupun ketika mereka berada dalam posisi untuk "mengendalikan." Dalam kajian ini, Peneliti berfokus untuk memahami bagaimana pengalaman mereka berkomunikasi dalam mengatasi permasalahan di Semarang Timur. Apakah mereka melakukan penyusunan strategi dengan melalui upaya-upaya demokratis dan jauh dari pengaruh superioritas atasan? Apakah mereka hanya mengikuti perintah atasan atau terinspirasi oleh kebiasaan yang ditinggalkan oleh pejabat sebelumnya? Selain itu, peneliti ingin mengetahui apakah implementasi kebijakan dan tindakan yang diambil sudah sejalan dengan prinsip-prinsip teori kontrol konservatif ini. Apakah para pekerja di DP3A sudah menginternalisasi tujuan dan kepentingan lembaga sehingga menjadi bagian dari kepentingan pribadi mereka? Peneliti juga ingin mengkaji sejauh mana para penyelenggara kegiatan pencegahan dan penanganan KDRT di Semarang Timur telah mengimplementasikan nilai-nilai yang tercantum pada peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas mereka.

1.5.4 Feminis Sosialis (*Socialist Feminists*)

Sepaham dengan feminis marxis, feminis sosialis merupakan aliran feminisme dengan sudut pandang yang menekankan pada anggapan bahwa kapitalisme merupakan sumber penindasan terhadap perempuan. Menurut pemikiran feminis sosialis, cara berpikir kapitalisme telah menghasilkan segregasi peran laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki berada di dunia publik dan perempuan di dunia domestik. Di sisi lain, feminis sosialis juga sepakat dengan feminis radikal bahwa patriarki juga merupakan sumber penindasan terhadap perempuan yang harus

dihancurkan pula. Dengan kata lain, dalam perspektif sosialis, terdapat dua kepala naga yang harus dihancurkan, yaitu kapitalisme dan patriarki (Tong, 2009: 4).

Feminis sosialis maupun marxis berpendapat bahwa selama masyarakat berjalan didasarkan dengan sistem kelas sosial, maka tidak ada seorang pun, terutama perempuan, yang dapat memiliki kebebasan sejati. Hal ini disebabkan karena dalam sistem ini kekuasaan dipegang oleh segelintir orang kaya yang mampu mengeksploitasi segala hal untuk mendapatkan keuntungan, termasuk pada para pekerja. Mereka meyakini bahwasanya akar permasalahan ini dimulai dari kepemilikan pribadi, yang mana menghilangkan kesetaraan yang pernah dinikmati individu dalam masyarakat. Hal ini memicu ketidaksetaraan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, terutama antara laki-laki dan perempuan.

Feminis sosialis dan marxis berpendapat bahwa penyebab utama dalam permasalahan ketidaksetaraan gender adalah kapitalisme. Di mana untuk mengatasi permasalahan ini sistem kapitalis perlu diubah menjadi sistem sosialis, yang mana semua orang memiliki kesempatan yang sama dalam mewujudkan kehidupan yang baik. Dengan begitu, perempuan tidak akan lagi bergantung pada laki-laki dan akan sama bebasnya dengan mereka (Tong, 2009: 4).

Tidak hanya itu, mayoritas feminis marxis dan sosialis juga meyakini bahwasanya pekerjaan rumah tangga merupakan pekerjaan yang penting dan harus dihargai. Mereka bahkan menginginkan agar pekerjaan rumah tangga dapat diterima sebagai pekerjaan yang dapat menghasilkan upah, layaknya pekerjaan di kantor atau pabrik. Hal ini didukung oleh beberapa ahli lainnya, seperti Benston, Dalla Costa, dan James. Beberapa di antara mereka bahkan menambahkan kalau

pekerjaan rumah tangga pada kenyataannya menciptakan nilai yang sangat besar bagi masyarakat, maka dari itu pekerjaan rumah tangga harus dibayar (Tong, 2009: 101).

Juliet Mitchell, dalam bukunya yang berjudul *Women's Estate*, menjelaskan bahwa kondisi perempuan tidak hanya didasarkan oleh faktor produksi, tetapi juga oleh faktor reproduksi, seksualitas, dan cara anak-anak disosialisasikan, sebagaimana ditekankan oleh feminisme radikal dan liberal. Menurut Mitchell, seluruh aspek ini harus diubah agar perempuan dapat mencapai kebebasan penuh atas dirinya sendiri. Dalam hal ini, Mitchell juga menekankan bahwa kapitalisme merupakan musuh utama seorang perempuan, lebih dari patriarki (Tong, 2009: 5).

Di sisi lain, Alison Jaggar menerangkan bahwa seluruh aliran feminis pada dasarnya sepakat kalau perempuan menghadapi tuntutan yang saling bertentangan dalam berbagai peran, seperti menjadi seorang istri, ibu, anak, pasangan, maupun seorang pekerja. Namun, dalam pandangannya terhadap feminisme sosialis, Jaggar berpendapat dengan menggunakan konsep alienasi di mana ia menjelaskan bahwa sistem kapitalis yang seharusnya memberikan perempuan rasa utuh, layaknya dalam hal pekerjaan, seks, ataupun hubungan keluarga, malah menjadi faktor dari keterasingan perempuan di dalam masyarakat (Tong, 2009: 5).

Setelah Mitchell dan Jaggar mengemukakan pendapat mereka, para ahli lainnya berupaya untuk menjelaskan mengapa perempuan kerap kali dianggap tidak setara dengan laki-laki. Alih-alih menitikberatkan pada satu sumber penindasan, mereka melihat bahwa kapitalisme (ekonomi) maupun patriarki (budaya) nyatanya saling berkaitan dan memengaruhi (Tong, 2009: 5).

Pada kaitanya dengan penelitian ini, seperti yang diketahui bahwa penjelasan terkait segregasi peran perempuan dan laki-laki akibat dari sistem kapitalisme yang ditekankan dalam feminisme sosialis ini berbanding lurus dengan objek penelitian yang membahas mengenai kasus KDRT di wilayah Semarang Timur. Dalam hal ini, eksistensi ideologi kapitalis menyebabkan kemunculan implikasi-implikasi yang pada akhirnya mengakibatkan dominasi yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Tidak terkecuali pembahasan terkait kekerasan yang dilakukan oleh mayoritas kaum laki-laki terhadap perempuan dengan alasan apapun yang melatarbelakanginya, khususnya faktor ekonomi.

1.5.5 Memahami Konsep Sosialisasi

Konsep sosialisasi merupakan pilar fundamental dalam kajian sosiologi (Long dan Hadden, 1985). Ide ini telah terintegrasi secara mendalam dalam disiplin ilmu sosial, sehingga peranya dalam membentuk masyarakat dan individu tidak lagi perlu dipertanyakan. Menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, sosialisasi adalah suatu proses internalisasi norma-norma sosial, nilai-nilai, dan budaya masyarakat. Melalui sosialisasi, individu memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial (Horton dan Hunt, 1968: 98).

Sosialisasi dapat diibaratkan sebagai proses internalisasi nilai-nilai, norma, dan peran sosial yang memungkinkan individu berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui sosialisasi, individu belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain, memahami struktur sosial, serta mengembangkan identitas diri.

Pada dasarnya, proses sosialisasi sendiri dimulai sejak kecil dan akan berlangsung sepanjang hayat manusia. Keluarga, sekolah, kelompok bermain, dan media massa merupakan agen-agen sosialisasi yang berperan penting dalam membentuk karakter dan perilaku individu. Bash dan Simmons (1981) menyatakan bahwa banyak sosiolog yang menganggap sosialisasi sebagai pondasi penting untuk mempertahankan masyarakat dan mendukung kesejahteraan individu (Long dan Hadden, 1985).

Pada tahap awal atau yang disebut sebagai sosialisasi primer, individu belajar cara menjadi bagian dari masyarakat dengan memahami sikap, nilai, dan tindakan yang dianggap tepat secara budaya dan sosial. Dalam hal ini, keluarga memiliki peran penting sebagai ‘pendidikan pertama’ dalam memberikan contoh dan pembelajaran yang baik kepada individu. Sosialisasi primer berperan krusial dalam membentuk dasar-dasar kepribadian individu dan kemampuannya beradaptasi dengan lingkungan sosial. Melalui proses ini, individu mempelajari aturan-aturan sosial yang tidak tertulis, sehingga mampu berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat (Anonymous, 2021: 48).

Setelah melalui tahap sosialisasi primer, individu memasuki tahap sosialisasi sekunder. Pada tahap ini, individu belajar norma-norma, nilai-nilai, dan peran sosial yang spesifik dalam kelompok-kelompok sosial tertentu. Sebagai contoh, saat bergabung dengan sebuah klub olahraga, individu akan belajar aturan-aturan, etika, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi anggota kelompok tersebut. Dengan demikian, jika sosialisasi primer berfokus pada pembentukan identitas individu sebagai anggota masyarakat secara umum, sosialisasi sekunder

lebih menekankan pada proses adaptasi individu terhadap kelompok-kelompok sosial yang lebih spesifik (Anonymous, 2021: 48).

Selanjutnya, terdapat tahap antisipatif. Di mana, sosialisasi antisipatif merupakan proses ketika individu melakukan persiapan mental dan perilaku untuk peran-peran sosial yang akan dijalani di masa depan. Proses ini melibatkan antisipasi terhadap tuntutan dan ekspektasi peran tersebut, serta upaya untuk mengembangkan kompetensi yang relevan. Sebagai contoh, anak-anak sering melakukan permainan peran untuk berlatih menjalankan peran orang dewasa, sementara mahasiswa kedokteran melatih keterampilan komunikasi dengan pasien sebagai persiapan untuk menjadi seorang profesional kesehatan. Dengan kata lain, sosialisasi antisipatif adalah sebuah proses pembelajaran proaktif yang memungkinkan individu untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan transisi peran secara lebih efektif. Melalui proses ini, individu dapat mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan peran yang akan dijalani, sehingga mengurangi kecemasan dan meningkatkan kesiapan menghadapi tantangan di masa depan (Anonymous, 2021: 48 – 49).

Terakhir, terdapat tahapan lain di luar tiga tahapan utama, yaitu resosialisasi. Resosialisasi adalah proses di mana seseorang mengalami perubahan mendasar dalam peran sosialnya, melibatkan pelepasan identitas lama dan pembentukan identitas baru. Proses ini dapat terjadi secara sukarela, misalnya saat seseorang mengubah agama atau pindah ke negara lain, atau secara tidak sukarela, seperti ketika seseorang keluar dari penjara. Saat mengalami resosialisasi, individu tidak hanya menambahkan peran baru, tetapi juga mengganti peran lama. Resosialisasi

dapat menjadi tantangan, namun dukungan sosial dan program rehabilitasi dapat membantu mempermudah transisi ini (Anonymous, 2021: 49).

1.6 Asumsi Penelitian

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, Peneliti berasumsi bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam proses penyusunan maupun perancangan program sosialisasi yang dilakukan oleh DP3A Kota Semarang untuk mencegah dan menekan tingginya kasus KDRT di Semarang Timur. Hal ini terlihat melalui fakta bahwa meskipun DP3A Kota Semarang telah melakukan program sosialisasi, jumlah kasus KDRT di wilayah tersebut justru terus meningkat dan tidak menandakan adanya tren penurunan. Hal tersebut secara tidak langsung telah menunjukkan bahwa program yang dilakukan kurang efektif untuk diterapkan di Semarang Timur.

1.7 Operasional Konsep

Penelitian dengan judul Memahami Pengalaman Sosialisasi Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Semarang Timur oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang ini terdiri dari beberapa unsur pembahasan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, kata ‘memahami’ memiliki definisi terkait proses kognitif di mana individu atau kelompok berusaha untuk memperoleh pengalaman yang kemudian diinterpretasikan menjadi sebuah esensi pengalaman. Pada kaitanya dengan penelitian ini, kata ‘memahami’ merujuk pada proses penggalian makna dan analisis terhadap bagaimana produksi kampanye atau kegiatan yang dilakukan

untuk menanggulangi tingginya kasus KDRT di wilayah Semarang Timur oleh DP3A Kota Semarang.

Kedua, kata ‘pengalaman’ diartikan sebagai sebuah peristiwa atau proses yang pernah dialami, dijalani, maupun dirasakan yang kemudian tersimpan dalam memori seseorang. Dalam penelitian ini, ‘pengalaman’ dimaknai sebagai sebuah proses dari pemikiran maupun peristiwa yang dialami oleh seseorang dalam menghasilkan sebuah strategi ataupun gagasan yang menjadi solusi dari permasalahan pada objek penelitian ini.

Ketiga, makna dari kata ‘sosialisasi’ merujuk pada proses di mana nilai dan norma disebarkan dan dipelajari oleh individu. Keluarga, sekolah, dan komunitas di lingkungan sekitar individu pun juga berperan dalam membentuk pemahaman yang ada pada dalam diri mereka. Pada penelitian ini, sosialisasi merupakan salah satu sarana yang digunakan Peneliti untuk menelaah lebih dalam bagaimana upaya penataran yang dilakukan oleh DP3A Kota Semarang dalam menanggulangi tingginya kasus KDRT di wilayah Semarang Timur.

Keempat dan terakhir, makna kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mencakup pada keseluruhan tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, mental, seksual, maupun penelantaran dalam rumah tangga. Termasuk ancaman, pemaksaan, atau pengambilan kebebasan seseorang di dalam rumah tangga, terutama terhadap perempuan. Dalam asosiasinya pada penelitian ini, KDRT yang menjadi objek penelitian dimaknai sebagai sebuah kasus yang marak terjadi di wilayah Semarang Timur. Hal ini sudah sangat mengkhawatirkan sebab dalam kurun waktu lima tahun terakhir, wilayah tersebut selalu menempati posisi pertama

dengan kasus KDRT paling besar dibandingkan wilayah lainya. Tentunya hal ini tidaklah luput dari berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus tersebut, seperti faktor ekonomi, pendidikan, dan sebagainya yang di mana wilayah tersebut juga termasuk ke dalam daerah dengan tingkat kesejahteraan paling rendah di Kota Semarang.

Secara keseluruhan, penelitian ini akan memuat proses analisis evaluasi terhadap kampanye dan program yang dilaksanakan oleh DP3A Kota Semarang dalam menekan tingginya kasus KDRT di Semarang Timur. Proses ini mencakup interpretasi terhadap pemikiran yang menghasilkan berbagai strategi dalam menyelesaikan permasalahan KDRT, khususnya di wilayah Semarang Timur. Di mana, kondisi ini sudah menjadi hal yang serius untuk segera dituntaskan hingga ke akarnya.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan desain penelitian fenomenologi. Penelitian kualitatif sendiri merupakan metode yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasi makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap fenomena sosial. Penelitian deskriptif kualitatif menyajikan data sebagaimana adanya tanpa melakukan manipulasi terhadap data yang telah didapat. Sebab, jenis penelitian ini berupaya untuk menyajikan gambaran yang jelas mengenai kondisi, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap fenomena yang diteliti melalui deskripsi yang mendalam terhadap variabel-variabel yang relevan. Proses penelitian ini tersusun atas perumusan pertanyaan penelitian

yang bersifat eksploratif, pengumpulan data yang mendalam, analisis data yang bersifat induktif, dan interpretasi data yang mendalam (Creswell, 2014: 4).

Desain penelitian fenomenologi dipilih untuk memahami secara mendalam dalam menggambarkan pengalaman hidup individu-individu yang terkait dalam pembentukan kegiatan sosialisasi KDRT di wilayah Semarang Timur oleh DP3A Kota Semarang. Fokus utama dari desain ini adalah pada pemahaman makna yang dibangun oleh individu terhadap pengalaman mereka, sehingga memungkinkan Peneliti untuk memasuki dunia subjektif partisipan dan memahami realitas sebagaimana mereka alami (Moustakas, 1994: 8).

1.8.2 Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, di mana Peneliti, secara sengaja, memilih subjek yang mereka anggap sesuai dengan proyek tersebut. Pemilihan informan sendiri berdasarkan pada penilaian Peneliti. Itulah mengapa, teknik ini juga kerap disebut sebagai *judgemental sampling* atau pengambilan sampel berdasarkan penilaian (Sarantakos, 2013: 177 – 178). Subjek pada penelitian ini ditujukan kepada pihak internal DP3A Kota Semarang, yaitu Kepala Dinas DP3A Kota Semarang, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Staf Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Pendamping Lapangan di Semarang Timur.

1.8.3 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang diperoleh melalui proses wawancara mendalam dengan subjek penelitian, yang mana hasil datanya akan diuraikan dalam bentuk catatan tertulis atau transkrip.

1.8.4 Sumber Data

1.8.4.1 Data Primer

Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang dilakukan dengan pihak internal DP3A Kota Semarang.

1.8.4.2 Data Sekunder

Data sekunder atau data pendukung yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari sumber tertulis, seperti buku, jurnal terdahulu, artikel, dan referensi kredibel lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara untuk mengolah keseluruhan data yang diperlukan dengan mempertahankan kekayaan dan keberagaman subjektivitas informasi yang diperlukan di dalam penelitian (Sarantakos, 2013: 288). Teknik wawancara yang digunakan yaitu wawancara semi-terstruktur, yang merupakan gabungan antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Teknik wawancara ini tersusun atas pertanyaan wawancara yang telah dibuat sedemikian rupa namun juga fleksibel terhadap pertanyaan tambahan yang diajukan secara acak sesuai dengan kebutuhan penelitian (Sarantakos, 2013: 278). Adapun beberapa elemen teknis dan parameter metodologis yang harus diperhatikan dalam melakukan wawancara kualitatif, yaitu:

- a. Refleksivitas (*reflexivity*), Peneliti juga menggunakan pandangan subjektif mereka dalam melihat dan menilai realitas serta mempertimbangkan

bagaimana pandangan mereka dapat memengaruhi cara mereka dalam memahami jawaban informan.

- b. Naturalisme (*naturalism*), wawancara kualitatif berfokus pada studi tentang kenyataan sebagaimana adanya, yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap kehidupan sehari-hari.
- c. Keutamaan responden (*primacy of the respondent*), responden merupakan para ahli yang mana pendapat dan pengalaman mereka sangat berharga bagi penelitian. Mereka tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga sebagai mitra dalam penelitian.
- d. Tidak ada standarisasi (*absence of standardization*), informan bebas menyampaikan pendapatnya dengan cara mereka sendiri, dan pewawancara bisa menyesuaikan pertanyaannya sesuai dengan jawaban informan.
- e. Keterbukaan (*openness*), Pewawancara tidak hanya mendengarkan, tetapi juga berinteraksi dengan informan. Mereka bisa bertanya lebih lanjut atau memberikan komentar untuk menggali informasi yang lebih dalam.
- f. Fleksibilitas (*flexibility*), percakapan dalam proses wawancara dapat mengalir secara alami, mengikuti arah topik pembicaraan yang muncul.
- g. Kehidupan dipandang sebagai proses (*life as process*), wawancara kualitatif mengeksplorasi aspek pengalaman pribadi yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.
- h. Penjelasan (*explication*), Temuan dari penelitian muncul selama wawancara dan diinterpretasikan pada saat itu juga.

1.8.6 Analisis dan Interpretasi Data

Penelitian ini akan menggunakan analisis metodologi fenomenologi transendental dalam mengolah dan menginterpretasikan data yang telah dihimpun. Menurut Moustakas (1994), fenomenologi transendental mengajak Peneliti untuk mencapai pengetahuan yang absolut melalui pengamatan secara mendalam tanpa langsung menilai terlebih dahulu. Peneliti harus memahami diri mereka sendiri secara mendalam, barulah memahami hubungan dengan orang lain dan dunia di sekitarnya. Hal ini merupakan cara berpikir yang logis dan murni, di mana kita harus melihat segala sesuatu apa adanya tanpa prasangka.

Dalam bukunya yang berjudul *Phenomenological Research Methods*, Moustakas (1994) mengembangkan metode analisis yang diusulkan oleh Stevick (1971), Colaizzi (1973), dan Keen (1975) guna mengatur dan menganalisis data fenomenologis. Berikut merupakan urutan analisis yang sesuai.

1. Membuat data-data transkrip wawancara mengenai pengalaman yang berkaitan dengan fenomena tersebut.
2. Melalui data yang sudah dihimpun kemudian dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Meninjau setiap pernyataan dan nilai signifikansinya untuk mendeskripsikan pengalaman.
 - b. Mencatat keseluruhan pernyataan yang relevan dengan penelitian.
 - c. Menyusun daftar pernyataan yang unik dan tidak saling tumpang tindih. Hal ini merupakan elemen makna dari suatu pengalaman.

- d. Menghubungkan dan mengklasifikasi elemen makna yang serupa ke dalam tema.
- e. Menggabungkan elemen makna dan tema tersebut menjadi deskripsi tentang tekstur pengalaman dan menyertakan realisasi atau contoh nyatanya.
- f. Mengevaluasi deskripsi tekstur yang telah disusun dan membangun deskripsi mengenai struktur pengalaman yang telah ada dengan variasi imajinatif.
- g. Membuat deskripsi tekstur-struktural dari makna dan esensi pengalaman yang ada.
- h. Melalui deskripsi tekstural-struktural individu semua informan, kemudian disusun deskripsi komposit tentang makna dan esensi pengalaman, dengan menggabungkan semua deskripsi informan menjadi satu deskripsi yang mewakili subjek penelitian.

1.8.7 Kualitas Data

Validitas dan reliabilitas merupakan aspek krusial dalam menilai kualitas data penelitian. Dalam konteks penelitian kualitatif, validitas mengacu pada sejauh mana temuan penelitian merefleksikan secara akurat realitas yang dialami oleh subjek penelitian. Dengan kata lain, apakah data yang diperoleh benar-benar menggambarkan fenomena yang ingin diteliti atau tidak. Namun, penting untuk dicatat bahwa realitas sosial pada penelitian kualitatif bersifat kompleks dan dinamis, sehingga pengujian terhadap penelitian ini akan melalui empat standar keabsahan, yaitu:

- a. Uji *Credibility* (Kredibilitas)

Uji kredibilitas menunjukkan bahwa hasil penelitian harus dapat dipercaya, dengan cara menerapkan triangulasi, merujuk pada referensi sebelumnya, dan memeriksa data secara teliti.

b. Uji *Transferability* (Keteralihan)

Uji keteralihan adalah pengujian yang menilai apakah hasil penelitian dapat diterapkan dengan baik dalam konteks atau situasi yang berbeda.

c. Uji *Dependability* (Kebergantungan)

Uji ketergantungan mengukur seberapa dapat dipercaya sebuah penelitian, dilihat dari ketepatan dan ketelitian peneliti dalam mengolah data yang dikumpulkan dari lapangan.

d. Uji *Confirmability* (Kepastian)

Uji kepastian berkaitan dengan pengujian objektivitas dalam proses penelitian, dengan memeriksa tahapan penelitian yang serupa dengan uji kebergantungan.